

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
MENGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**



Oleh

**FAJRUR RAHMAN SYAWALI**

**NIM : 12520090**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
MENGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**FAJRUR RAHMAN SYAWALI**

**NIM : 12520090**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
MENGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**

Oleh

**FAJRUR RAHMAN SYAWALI**

NIM : 12520090

Telah Disetujui, 28 Desember 2016  
Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



H. Nantik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720622 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
MENGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA  
RUANG KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Oleh  
**FAJRUR RAHMAN SYAWALI**  
NIM: 12520090

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 4 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji  
**Sri Andriani, SE., M.Si**  
NIP.19750313 200912 2 001

: (  )

2. Sekretaris/Pembimbing  
**Nawirah, SE., MSA., Ak., CA**  
NIP. -

: (  )

3. Penguji Utama  
**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA** : (  )  
NIP. 19750707 200501 1 005

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Hj. Nanti Mahyuni, SE., MSA., Ak., CA**  
NIP. 19320822 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrur Rahman Syawali  
NIM : 12520090  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**kalim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Desember 2016

Hormat saya,

Fajrur Rahman Syawali

NIM: 12520090

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT beserta Nabi besar Muhammad SAW atas ridho, rahmat, dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis. Karya sederhana penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dan menyayangiku.

Bapak (Drs. H. Abd Wahab) dan ibu (Hj. Suryani) tercinta terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini dan terimakasih juga atas do'a dan ridho yang selalu kalian berikan sehingga aku bisa menyelesaikan karya tulisanku ini dengan hati yang penuh semangat dan bahagia. Bagiku support kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidupku. Adik-adikku terimakasih karena kalian yang sudah menjadi inspirasi kakak untuk bisa cepat menyelesaikan karya tulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing yang terhormat (Nawirah, SE., MSA., Ak., CA) terimakasih atas do'a serta dukungan yang selalu diberikan kepadaku, sehingga aku selalu semangat untuk bisa menyelesaikan tulisan ini. Tak lupa juga terimakasih kepada seluruh dosen-dosen Akuntansi UIN Maliki Malang yang sudah mendukung dan juga selalu mensupportku.

Teman-teman dan sahabat-sahabatku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selalu kalian berikan kepadaku.

## MOTTO

**Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu menguba hasrathati suci. Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. Itulah tantangan hidup**

**Jalan terbaik dalam mencari kawan adalah kita harus belaku sebagai kawan**

### **Kupersembahkan kepada :**

- ❖ Yang tercinta bapakku dan ibuku,
- ❖ Yang terkaasih saudara-saudaraku,
- ❖ Yang tercinta almamaterku,

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga skripsi ini dapat penulis selsaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW sebagai syuri tauladan sekaligus pemimpin bagi umat manusia yang telah menuntun umatnya dengan penuh perjuangan dan kesabaran menuju jalan yang diridhop Allah SWT, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sepanjang zaman,

Pada kesempatan ini, dengan segala kesederhanaan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan do'a, baik langsung maupun tidak dalam penyelesaian skripsi ini kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo MSc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE, M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak., CA dan selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa mengarahkan, mendorong dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen karyawan Fakultas Ekonomi dan seluruh karyawan fakultas Ekonomi terutama Dosen-dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan segenap ilmunya dan bantuan yang bermanfaat.
6. Ayah dan ibu saya, sujud syukur kupersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang tiada henti-hentinya memberikan kasih saying, nasehat, semangat, dan dukungan baik dalam hal moril, spiritual lantunan doa-doanya yang selalu menyertai setiap

langkah hidup penulis untuk menjadikan penulis lebih dewasa, mandiri, tanggung jawab, dan agar selalu berada di jalan Allah SWT.

7. Adik-adiku yang selalu memberikan support, semangat dan doa untuk selesainya penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat, teman-teman Ekonomi 2012, yang selalu memberikan semangat, dan bantuan kepada penulis, dan yang selama ini bersama-sama dalam menuntut ilmu di UIN Malang. Indah sekali rasanya dahulu bisa melewati hari-hari bersama kalian semua dan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak akan pernah terlupakan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagai seorang dan manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan tak luput dari salah, sehingga besar harapan penulis bagi segenap pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak yang memerlukan. Amin ya Robbal Alamin

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Malang, 28 Desember 2016

Fajrur Rahman Syawali

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, da Bahasa Arab)</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	11
2.2.1 Kinerja Pada Pemerintah Daerah .....	11
2.2.2 Akuntansi Pemerintahan .....	14
2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan .....	14
2.2.2.2 Fungsi Akuntansi pemerintahan .....	15
2.2.2.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan .....	16
2.2.3 Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan .....	17
2.2.4 Komposisi Belanja Pemerintah .....	19
2.2.4.1 Komposisi Belanja Langsung .....	19
2.2.4.2 Komposisi Belanja Tidak Langsung .....	20
2.3 Standar Akuntansi Pemerintah .....	21
2.3.1 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan .....	22
2.3.2 Laporan Keuangan .....	24
2.3.3 Laporan Keuangan Pemerintah .....	25
2.4 Value For Money .....	26
2.4.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money .....	27
2.4.2 Langkah-langkah Pengukuran Value For Money .....	28
2.5 Kerangka Berpikir .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian .....	33
3.3 Subjek Penelitian .....	34
3.4 Data dan Jenis Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum .....	37
4.2 Visi dan Misi .....	43
4.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	45
4.5 Hasil dan Pembahasan .....	46
4.5.1 Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 .....	46
4.5.2 Analisis Hasil Penelitian .....	51
4.5.2 Value For Money .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Rincian APBD Tahun 2015 .....	59
Tabel 4.2 Rincian APBD Tahun 2014 .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	30
--------------------------------------	----



## ABSTRAK

Fajrur Rahman Syawali. 2017, SKRIPSI. Judul: “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money pada Dinas PU. Cipta Karya Dan Taata Ruang Kabupaten Sumenep”.

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Value For Money, Ekonomis, Eisiensi, Efektifitas,

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengelolaan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Dan Tata Ruang kabupaten Sumenep. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan berupa indept interview, observasi dan dokumenter yang kemudian dianalisis atas pengelolaan akuntaksi keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Fokus yang dinilai penulis adalah Laporan Realisasi Anggaran, Lapoan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam pertanggungjawaban laporan ini disimpulkan Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Dan Tata Ruang kabupaten Sumenep ada sebagian yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. APBD merupakan suatu rencana kerja keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan pada daerahnya. Dalam melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran tapi juga harus output yang dihasilkan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2014-2015 secara keseluruhan adalah baik.

## ABSTRACT

Fajrur Rahman Syawali. 2017, Thesis. Title: "Local Government Performance Measurement Using Principle of *Value For Money* on the department of Public Works of creation and Spatial of Sumenep".

Supervisor: Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

---

Keywords: Government Accounting Standards, Value For Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

The problems that were examined in this thesis were how the management of financial accounting based on Government Regulation No. 71 of 2010 at the Department of Public Works of creation and Spatial of Sumenep regency. To answer these problems, the researcher used a qualitative approach, according to the problem, the data used in-depth interview, observation and documentary then analyzed for the management of financial accounting based on Government Regulation No. 71 Year of 2010.

Focuses assessed the Researcher are the Budget Realization Statement, Statement of Changes of Budget Balance more, balance sheet, statement of Operations, Statement of Changes in Equity, Notes to the Financial Statements. In this report concluded the department of Public Works of creation and Spatial of Sumenep regency was in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010 partially.

Public sector budget system in its development had become a multifunctional policy instruments that was used as a tool to achieve organizational goals. APBD was a plan of work of local government finance to be used as a basis for development in the region. In conducting the preparation, discussion, determination and supervision, the implementation of the budget was not enough to look at the size of the budget only but also needed the output that was produced economically, efficiently and effectively to the progress of the region. In this research, the author wanted to analyze the performance of the local government of Sumenep by using the principle of value for money which was based on three ratios, I.e. economical ratio, the ratio of the efficiency and effectiveness ratio. The results showed that the performance of local governments of Sumenep year period of 2014-2015 was good as a whole

## مستخلص البحث

فجر الرحمن شوالى. 2017. بحث جامعى. العنوان: " قياس الأداء الحكومي المحلى باستخدام مبدأ القيمة على المالية Value For Money على وزارة الأشغال العامة الاعمالية والمكانية سومينيب. "

المشرفة: نورة، الماجستير

كلمات الرئيسية: معايير المحاسبة الحكومي، القيمة على المالية والاقتصاد والكفاءة والفعالية المشكلة التي تبحث في هذه الدراسة هي كيف تقوم بإدارة المحاسبة المالية بشأن تنظيم الحكومة رقم 71 لسنة 2010 في وزارة الأشغال العامة الاعمالية والمكانية سومينيب. في الإجابة على هذه المشاكل، استخدم الباحث المنهج النوعي، وفقا لهذه المشكلة، ثم تم تحليل البيانات المستخدمة في مقابلة، والمراقبة وثائقي لإدارة المحاسبة المالية على أساس تنظيم الحكومة رقم 71 عام 2010.

تقييم تركيز الباحث هو بيان تحقيق الميزانية، بيان التغيرات الميزانية العمومية والميزانية العمومية وبيان العمليات، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، إيضاحات حول القوائم المالية. في المسألة هذا التقرير حصلت عن وزارة الأشغال العامة الاعمالية والمكانية سومينيب هناك بعض الذي وفقا للائحة الحكومة رقم 71 عام 2010.

فقد أصبح نظام ميزانية القطاع العام في تطورها على أدوات السياسة المتعددة الوظائف التي تستخدم كأداة لتحقيق الأهداف التنظيمية. APBD هي خطة عمل تمويل الحكومة المحلية لاستخدامها كأساس للتنمية في المنطقة. في إجراء إعداد ومناقشة، تقرير للإشراف على تنفيذ الميزانية ليست كافية مجرد إلقاء نظرة على حجم الميزانية ولكن تحتاج أيضا إلى الإخراج المنتجة اقتصاديا، بكفاءة وفعالية في تقدم المنطقة. في هذه الدراسة، أرادت الكتاب لتحليل أداء الحكومة المحلية سومينيب باستخدام مبدأ القيمة مقابل المال التي تقوم على ثلاث نسب، نسبة الاقتصادية، نسبة الكفاءة ونسبة فعالية. وأظهرت النتائج أن أداء الحكومات المحلية سومينيب فترة السنوات 2014-2015 ككل جيد

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari pengguna sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomi, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah melalui sistem akuntansi pemerintah daerah. SAP menegaskan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat

yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Standar akuntansi pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional, dimana menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN / APBD dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun

mengikuti standar pemerintah yang secara nasional telah diterima, sehingga setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengisyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang telah diundangkan dalam perundang-undangan pemerintah.

Setidaknya dari undang-undang tersebut pemerintah melalui instansinya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD yang berupa laporan keuangan yang setidaknya laporan realisasi keuangan, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adanya pertanggung jawaban keuangan, pemerintah telah melakukan pengembangan kerangka konseptual akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dimana hal tersebut adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasional pemerintah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, karena standar akuntansi pemerintahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, dimana tujuan dari sistem akuntansi pemerintahan itu sendiri untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan

pengembangan sistem akuntansi pemerintahan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan penerapan standar akuntansi tersebut.

Penatausahaan keuangan yang dimaksud merupakan pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan penatausahaan keuangan atas pendapatan dan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua SKPD dalam melakukan pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada pedoman yang telah ada dan ditetapkan.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP akrual selambat-lambatnya harus dilakukan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintah berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep juga merupakan entitas pemerintahan yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk

transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis Akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Dalam mengatasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan SDM, pengadaan sarana dan Prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

Keadaan ini menjadikan penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul yaitu, “PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah :

Bagaimana pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep?.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berbasis pelaksanaan akuntansi pemerintahan, maka yang menjadi tujuan adalah :

Untuk mengetahui pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Kepentingan Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep sebagai bahan masukan untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah menuju pada akuntansi publik.

### B. Manfaat Untuk Kepentingan Ilmiah

Hasil penelitian ini dipergunakan oleh penulis dan peneliti lain yang meneliti obyek sejenis sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat lebih sempurna.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

1. Manangkalagi (2013) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015. Vol. 1. No. 3. 2013. Hal. 22-31
2. Akuba (2013) dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Vol. 1. No. 1. 2013. Hal. 9-16
3. Kema (2013) dengan judul analisis penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan daerahh pemerintah Kota Manado sesuai dengan SAP. Metode yang

digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan daerah belum mengacu pada SAP, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kota manado telah berpedoman SAP. Vol. 1. No. 3. September 2013. Hal. 771-781

4. Niu (2015) dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotamobagu. Tujuannya mengetahui penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu belum Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. Vol.2 No.4 Hal. 714-722

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama & Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Objek Peneliti	Hasil Penelitian
Manangkalangi (2013)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. .	penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.	Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015.

Akuba (2013)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.	apakah Pemerintah Kota Gorontalo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.	pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya
Kema (2013)	analisis penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado.	penyajian laporan keuangan daerahh pemerintah Kota Manado sesuai dengan SAP.	pemerintah kota manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan daerah belum mengacu pada SAP, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kota manado telah berpedoman SAP.
Niu (2015)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kotamobagu.	penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.	Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu belum Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006.

## **2.2. Kajian Teori**

### **2.2.1. Kinerja pada Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan anjuran Pemerintah dalam UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 memberi arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut memberi dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kekuasaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh Satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran daerah dibawah koordinasi Sekretaris daerah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab. SKPD adalah sebagai Bendahara Umum daerah, dengan demikian fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD Setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana amanah mempunyai kewenangan untuk menata dan mengatur masyarakatnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah adalah menjadi ulil amri, dan masyarakat juga diwajibkan mentaati segala yang diperintahkan. Sebagaimana yang termaktub didalam Kalam

Allah yang mewajibkan umatnya untuk mentaati ulil amri dalam surat An-nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Agama islam juga sangat memperhatikan mengenai amanah atas sebuah kekuasaan yang diberikan. Dalam hal pemerintahan, islam mengharuskan bagi seseorang ataupun pemerintah yang diberikan amanah oleh orang lain untuk mempertanggungjawabkannya. Tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(An-Nisa' :58)*

Ayat tersebut merupakan prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggungjawab terhadap amanahnya serta kekuasaan yang telah diberikan, dengan sikap adil dan bijaksana. Dan Allah merupakan Dzat diatas segalanya. Hal tersebut menandakan bahwa Allah telah mengatur semua sendi-sendi kehidupan umatnya melalui konstitusi yang ada di dalam al-Qur'an, dan menunjukkan adanya *syumuliatul Islam* (kesempurnaan Islam).

Dengan begitu pentingnya menjaga amanah tersebut, sehingga tidak semua orang mampu mengemban amanah yang diberikan. Sebagaimana hadist nabi berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِنُنِي؟ قَالَ فَضْرَبَ  
بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ  
فِيهَا)

Artinya:

*Dari Abu Dzarr berkata, saya berkata kepada Rasulullah saw. wahai Rasul, hendaklah engkau memberiku jabatan? Rasulullah saw. kemudian menepuk punggungnya seraya berkata, wahai Abu Dzarr, sesungguhnya engkau itu lemah dan sungguh jabatan itu adalah amanah dan jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya”.*

## **2.2.2. Akuntansi Pemerintahan**

### **2.2.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Setiap instansi pemerintahan pada saat sekarang ini untuk senantiasa melakukan akuntansi agar pengelolaan keuangan yang dipertanggung jawabkan dapat terlihat secara transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi Pemerintahan adalah proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklasifikasi dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pemakai untuk pengambilan keputusan (Siregar, 2005: 365).

Pemerintah sebagai organisasi yang memegang peranan sangat penting dan paling utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan, karena akuntansi pemerintah saat ini akan menuju pada akuntansi yang transparansi dan akuntabel.

### 2.2.2.2. Fungsi Akuntansi Pemerintahan

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas maksudnya, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pengurusan keuangan negara.
- b. Manajerial maksudnya dapat dipergunakan untuk :
  - 1) Perencanaan,
  - 2) Analisis dan peneletian program,
  - 3) Penganggaran,
  - 4) Menilai pengurusan yang efektif berbagai tingkat pemerintah,
  - 5) Pengendalian biaya.

(Gede, 2000: 89)

Dengan adanya sistem akuntansi pemerintahan dapat memberikan arahan yang jelas bagi pengelola keuangan pemerintah agar dalam pelaksanaannya tepat sesuai dengan yang direncanakan dan juga dapat mengendalikan atas biaya keuangan yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional.

Untuk menjaga kelangsungan akuntansi pemerintahan diperlukan sumberdaya manusia yang profesional dalam pengelolaan akuntansi agar pada setiap kegiatan dapat dievaluasi dan teranalisis sesuai tingkat keberhasilan kegiatan.

### 2.2.2.3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Dalam penataan akuntansi pemerintah senantiasa dilaksanakan secara baik, sehingga karakteristik akuntansi pemerintahan menjadi jelas akan bentuk pertanggungjawaban keuangan.

Sebagaimana yang dikutip (Gede, 2000: 21) persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu :

- a. Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan undang-undang dasar, undang undang dan peraturan lainnya dari negara,
- b. Sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan,
- c. Perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasi obyek dan tujuan untuk apa dana yang diterima dan digunakan,
- d. Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan pemeriksaan, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan,
- e. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan secara administratif terhadap dana dan pelaksanaannya,
- f. Sistem akuntansi dapat memungkinkan tersedianya data keuangan yang berguna,
- g. Sistem akuntansi harus mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program,

h. Sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar dan diperlukan.

Dari persyaratan sistem akuntansi pemerintahan yang dibuat PBB dapat dijelaskan secara umum berkenaan dengan akuntabilitas dan bertujuan untuk menyajikan informasi untuk pemenuhan bagi keperluan manajemen dan bertujuan untuk pelayanan perkiraan analisis ekonomi dan fungsional dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntansi pemerintahan secara umum melayani dua tujuan yang luas yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam memberikan informasi untuk manajemen. Namun tidak terdapat model atau desain tunggal untuk suatu sistem akuntansinya dan untuk pelaporan keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, akan tetapi pada satu tujuan yaitu sistem akuntansi pemerintahan.

Banyak faktor yang mempengaruhi seperti persyaratan-persyaratan dan pembahasan oleh peraturan dan hukum, nilai budaya dan tradisi serta faktor-faktor lainnya. Hal-hal itu semua akan sangat mempengaruhi baik sistem akuntansi dana pelaporan keuangan pemerintah maupun prinsip-prinsip yang akan diharapkan serta entitas pelaporan pemerintahan itu sendiri yang menuju pada transparansi.

### **2.2.3. Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan**

Tujuan dan penyajian laporan keuangan merupakan dasar dari penentuan prinsip-prinsip tertentu yang digunakan dalam unit-unit pemerintah, dengan tujuan ini memberikan pelayanan kepada rakyat.

Tujuan akuntansi pemerintahan yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk pihak tertentu

yang bertanggung jawab dan kepentingan atas operasi unit-unit pemerintah (Gede, 2000: 179).

Tujuan akuntansi pemerintah yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam pelaksanaan anggaran, yaitu dengan tujuan umum :

- a. Menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan,
- b. Memberikan pertanggungjawaban,
- c. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan dan organisasi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan juga menekankan pada akuntabilitas pada ketujuh prinsip pokok yang mendasari akuntansi dari laporan keuangan atas kegiatan pemerintahan yang menuju pada pemerintahan yang baik.

Adapun prinsip-prinsip pokok pada dasarnya dikelompokkan

1) Laporan Akuntabilitas Akuntansi

Sistem Akuntansi Pemerintahan harus memenuhi dua hal :

1. Menyajiakan laporan keuangan secara benar dengan ungkapan lengkap atas posisi keuangan dan hasil kegiatan
2. Menetapkan dan menunjukkan ketaatan pada perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan negara.

2) Sistem Akuntansi Dana

Satu kesatuan fiskal dan akuntansi dengan seperangkat perkiraan yang seimbang untuk membukukan kas dan sumber lainnya.

3) Tipe Dana

Terdapat tiga dana, *govermental funds* dan *proprietary funds* serta *fiduciary funds*.

4) Dana Ketergantungan

Banyaknya dana tergantung dari kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan keuangan.

5) Pembukuan Aktiva Tetap dan jangka Panjang

Dibebankan antara aktiva tetap dengan aktiva umum.

6) Perolehan Aktiva Tetap

penilaian ini berdasarkan harga perolehan (*cost*).

#### **2.2.4. Komposisi Belanja Pemerintahan**

##### **2.2.4.1 Komposisi Belanja Langsung**

Dengan telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat eks kanwil/kandep yang telah dan akandilimpahkan kepada pemerintah daerah, dimana setiap penggunaan anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kondisi keterbatasan pendapatan daerah saat ini perlu lebih diupayakan adanya penghematan belanja rutin secara sungguh-sungguh, kecuali untuk komponen dana belanja pegawai. Penghematan belanja rutin non pegawai dilakukan melalui rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riil dari setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah.

Anggaran rutin untuk masing-masing unit kerja, secara umum memiliki komposisi dan format yang sama, yaitu terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja lain-lain. Secara umum, struktur pengeluaran rutin semua unit kerja didominasi oleh belanja pegawai.

#### Belanja Pegawai

Pengeluaran Belanja Pegawai dialokasikan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, honorarium, uang lembur, upah pegawai harian tetap dan biaya perawatan dan pengobatan pegawai.

#### **2.2.4.2. Komposisi Belanja Tidak Langsung**

##### 1). Belanja Barang

Pengeluaran Belanja Barang di alokasikan antara lain untuk berbagai kebutuhan seperti ongkos kantor, pemeliharaan kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, biaya pakaian dinas dan lain-lain.

##### 2). Belanja Pemeliharaan

Penyediaan Belanja Pembangunan diprioritaskan untuk memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum dalam rangka mempertahankan / meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Alokasi pengeluaran belanja pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess dan lain-lain, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya pemeliharaan inventaris kantor dan lain-lain.

### 3). Belanja Perjalanan Dinas

Pengeluaran belanja perjalanan dialokasikan antara lain untuk biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan pindah baik dalam daerah maupun luar daerah, dan lain-lain. Penyediaan belanja biaya perjalanan dinas agar dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

### 4). Belanja Lain-lain

Pasal belanja lain-lain hanya untuk menampung kredit anggaran yang tidak dapat disediakan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Sehubungan dengan hal tersebut, belanja lain-lain bukan untuk menampung penyediaan dana yang dicadangkan untuk keperluan tertentu yang sewaktu-waktu dapat digunakan menutupi kekurangan penyediaan dana pada belanja-belanja tersebut diatas, misalnya uang perangsang, biaya operasional, biaya observasi dan penyuluhan sosial, dan lain-lain. Serta adanya dana bantuan dan dana sosial serta dana hiba.

## 2.3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Mahsun, 2013: 91).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pada pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah serangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Adanya hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam menyusun akuntansi yang diterapkan pemerintah kepada semua satuan kerja perangkat daerah, sehingga semua laporan pertanggung jawaban keuangan telah transparan dan akuntabel.

Kerangka konseptual sistem akuntansi pemerintahan yang dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan transaksi keuangan, sehingga pelaksana akuntansi dapat terlaksana secara baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Standar akuntansi pemerintahan ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya serta entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan.

### **2.3.1. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Membantu para pengguna pengelola sumber daya serta suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban serta dana

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 2.3.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsi-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- a) Aset,
- b) Kewajiban,
- c) Ekuitas Dana,
- d) Pendapatan,
- e) Belanja,
- f) Transfer,
- g) Pembiayaan,

#### h) Arus Kas

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD yang selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, bahwa komponen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari yaitu :

- a) Laporan Realisasi Anggaran,
- b) Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih
- c) Neraca,
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas,
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **2.3.3. Laporan Keuangan Pemerintahan**

Laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 171) laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung jawaban publik yang mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut: (1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, (2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### **2.4. Value For Money**

*Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep

value for money dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009:115).

#### **2.4.1. Pengukuran Kinerja berdasarkan Konsep Value For Money**

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangibile output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

1. Ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.
2. Indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

- a. Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.
- b. Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.

- c. Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan profesional merupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.
- d. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi (Mardiasmo, 2009:129).

#### 2.4.2. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money

Menurut (Mardiasmo 2009:133) langkah-langkah pengukuran value for money adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Rasio Ekonomis dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

## 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Rumus rasio efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

### 3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio efektivitas dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pedapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

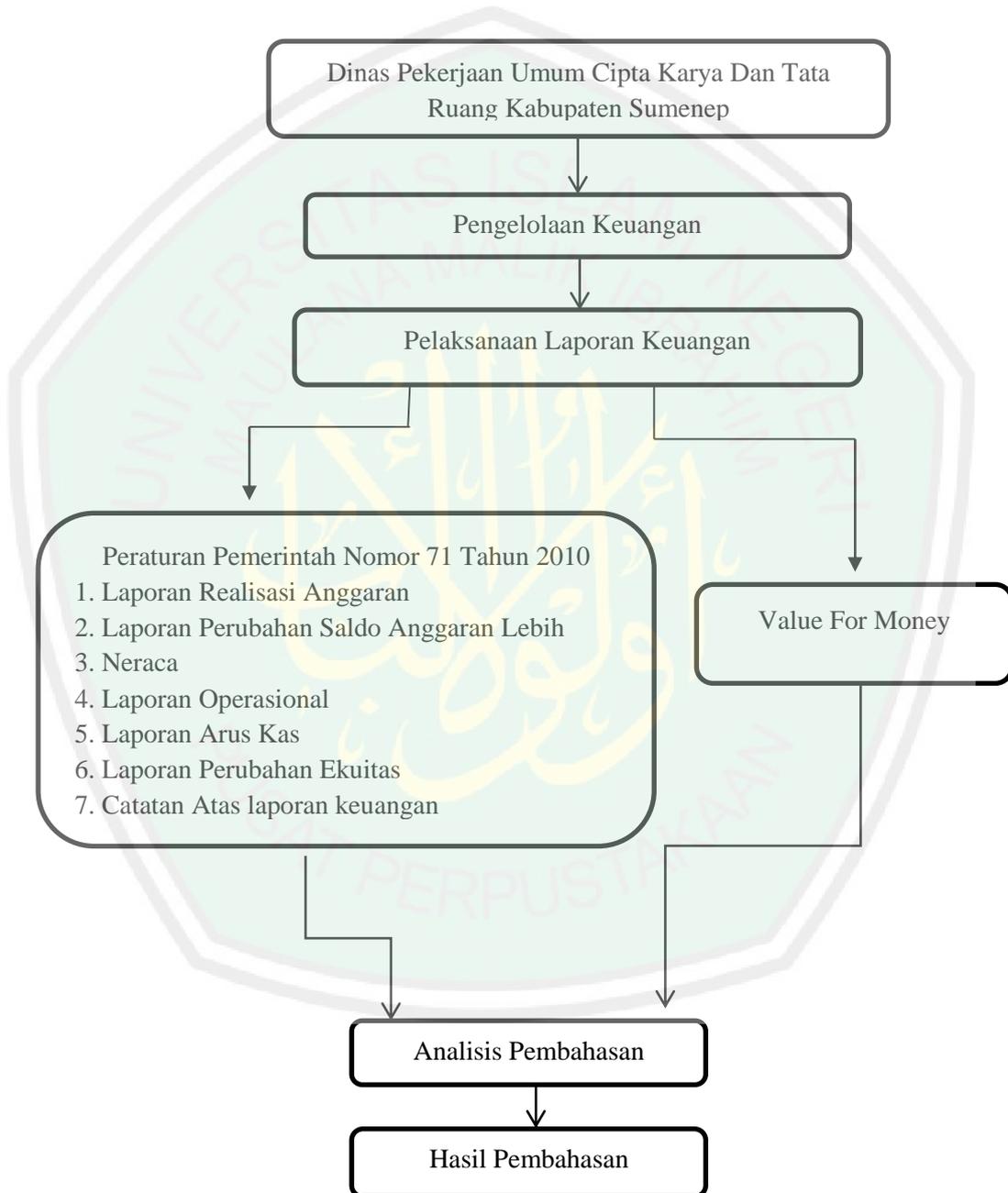
Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

## 2.5. Kerangka Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Kerangka konseptual pada gambar 2.1 diatas menjelaskan terkait pengelolaan akuntansi keuangan yang meliputi pelaksanaan laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Value For Money kemudian ditarik kesimpulan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku dan apakah sudah ekonomis, efektif atau efisien.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep. Kuncoro (2009: 12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Menurut Lexy J Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jika dilihat dari tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha meneliti atau melakukan study observasi. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder yang diperoleh benar-bener dapat di pertanggungjawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep di Jl. Kamboja No. 27B, Kolor, Kota Sumenep.

### 3.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep sedangkan untuk objeknya adalah pengelolaan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

### 3.4. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a) Data Primer

Data primer yaitu sebagai data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari pelaksana sistem akuntansi keuangan dan juga diperkuat dengan hasil interview dengan pelaksana terkait lainnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari data yang ada, serta kajian dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara dan penulis sebagai pihak pengumpul dan data tersebut kemudian diolah lebih lanjut.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sistem dan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2003: 156).

a) Survei Lapangan

(a) Pengamatan

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap pekerjaan yang terkait dengan pihak-pihak aparatur sekaligus penanggungjawab atas pengelolaan keuangan.

(b) Interview (Wawancara Mendalam)

Interview yang dilakukan sebagai teknik pengumpul data dalam melakukan studi pendahuluan, menemukan permasalahan yang harus diteliti lebih mendalam..

(c) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari, mencatat / menyalin data yang telah ada seperti arsip catatan resmi dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Survei Kepustakaan

Dokumen yang ada relevansinya dengan masalah penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pendukung teoritis dalam penyajian data.

### 3.6 Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan supaya peneliti ini lebih mudah dibaca, difahami dan di enterpretasikan. Oleh karena itu, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2003: 428) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam masing-masing bidang, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga udah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data.
4. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum

##### 1) Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang “Pembentukan Organisasi Dinas Daerah”, bahwa Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang selaku pelaksana Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

##### 2) Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 2009 Tahun 2012 tentang Perubahan dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.

**1. Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang** dipimpin oleh seorang kepala dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**2. Sekretaris Dinas** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, dan keuangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
2. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
3. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
4. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang;
5. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tataruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi ;

- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan perencanaan;
- c. Sub Bagian keuangan;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

**3. Bidang Penata Ruang** mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan ruang.

Bidang Penata Ruang Mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penata ruang;
2. Pengelolaan dan penganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan tata ruang;
3. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi tata ruang;
4. Pelaksanaan survey, pemetaan tata ruang;
5. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya penata ruang;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penata Ruang Membawahi :

- a. Seksi Pengaturan;
- b. Seksi Pembinaan;
- c. Seksi Pembanguna dan Pengawasan;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

**4. Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman** mempunyai tugas melaksanakan bangunan gedung, lingkungan pemukiman dan jasa kontruksi.

Bidang Pembangunan Dan Lingkungan permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pembangunan dan lingkungan permukiman;
2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan lingkungan permukiman;
3. Pelaksanaan bantuan teknis serta upaya keselamatan pembangunan gedung negara dan lingkungan permukiman;
4. Pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi pengembangan pembangunan dan pemeliharaan gedung negara dan lingkungan permukiman;
5. Pelaksanaan bantuan teknis berupa jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bangunan dan pemeliharaan gedung negara dan lingkungan permukiman;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Lingkungan permukiman;
- b. Seksi Bangun Gedung;
- c. Seksi Jasa Kontruksi;

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Permukiman.

**5. Bidang Pembangunan dan Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan perumahan dan perbaikan lingkungan, penyediaan air minum serta penyelenggaraan sanitasi Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perumahan;
2. Pemberian bantuan perencanaan teknis perbaikan dan peremajaan perumahan;
3. Pemberian pembinaan dan pengaturan tata perumahan;
4. Pelaksanaan pengawasan pembanguna perumahan;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemberian rekomendasi izin perumahan dan kawasan perumahan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perumahan terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Perumahan dan Perbaikan Lingkungan;
- b. Seksi Penyediaan Air Minum;
- c. Seksi Penyelenggaraan Sanitasi;

**6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan, dan pembinaan teknis bangunan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian bangunan;
2. Pelaksanaan pemantauan dalam rangka pembangunan bangunan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengendalian pendirian bangunan;
4. Penertiban bangunan dan pemberian rekomendasi teknis terkait bangunan;
5. Pelaksanaan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya kendalan bangunan;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan terdapat 3 Seksi diantaranya :

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian bangunan;
- b. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan;
- c. Seksi perizinan.

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai bidang keahlian dan kebutuhan, tetapi sampai saat ini kelompok jabatan dimaksud belum ada.

**8. UPT Dinas PU. Cipta Karya dan Tata ruang** merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang di wilayah kecamatan. UPT Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dibidang administrasi. Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### **4.2. Visi dan Misi**

Sebuah organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, perlu menetapkan Visi dan Misi yang akan diwujudkan. Visi dan Misi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dan dicita-citakan yang digunakan sebagai pedoman, arahan dan acuan untuk mengolah pembangunan ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep dijabarkan secara operasional dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap nilai-nilai strategis (sumber daya alam, sumber daya organisasi dan sumber daya manusia) yang dimiliki dan berkembang, lingkungan strategis dan aspirasi yang berkembang; maka Visi Dinas PU, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dirumuskan sebagai :

“Terciptanya pembangunan prasarana dan sarana dasar Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang handal dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera“.

Pengertian pembangunan prasarana dan sarana dasar yang handal adalah bahwa pembangunan prasarana dan sarana yang dikelola secara profesional dan tepat guna yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan rumusan visi dan misi yang ditetapkan, maka misi yang diemban Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, adalah :

- a. Penyelenggaraan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka terwujudnya manfaat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan secara lebih profesional mandiri dan transparansi.

- c. Memacu kemandirian dan kemampuan dalam pembangunan Prasarana dan sarana Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### **4.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan dan diwajibkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

#### **4.5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.5.1. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2015**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kabupaten Sumenep atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu tahun anggaran.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang yang disusun dan disajikan terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015

Laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang tahun anggaran 2015 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi untuk pembiayaan berdasarkan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Laporan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata

Ruang juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

## 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

## 3) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4) Laporan perubahan ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5) Neraca tahun 2015

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Neraca Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang tahun 2015 menyajikan pos-pos aset yang terbagi menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selain kedua pos tersebut, neraca Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang juga menyajikan ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

6) Laporan Arus Kas tahun 2015

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya serta menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Komponen laporan arus kas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

7) Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2015

Catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang tahun 2015 terdiri dari tujuh bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab kedua memuat informasi tentang ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab ketiga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab keempat menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Bab lima berisi tentang gambaran umum dan akuntabilitas keuangan.

#### **4.5.2. Analisis Hasil Penelitian**

Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan

yang mengacu pada basis kas, kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan baru tentang Standar Akuntansi pemerintahan ini mulai efektif dilaksanakan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Pelaksanaan perubahan peraturan tentunya tidak mudah, perlu adanya pemahaman dari peraturan baru sehingga pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan transisi selama empat tahun kedepan dengan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang tahun 2015 menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang tahun 2015 telah sesuai dengan PSAP No 1 paragraf 25 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Identifikasi setiap komponen laporan keuangan juga telah memenuhi syarat sesuai dengan PSAP 01 ayat 26 yang mana pada setiap komponen laporan keuangan disajikan informasi mengenai nama entitas pelaporan, cakupan laporan keuangan, tanggal pelaporan, mata uang pelaporan, dan ketepatan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

### ***1) Laporan Realisasi Anggaran***

Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang diterapkan Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, disusun dengan keadaan anggaran yang ada di Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, sehingga laporan realisasi anggaran yang ada dapat memberikan informasi atas pelaksanaan anggaran yaitu :

a. Pendapatan

Berdasarkan laporan realisasi anggaran jumlah pendapatan Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dinilai nihil, karena dinas ini tidak mengadakan pungutan retribusi dan bukan sebagai instansi penghasil, sehingga dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat target dan realisasi.

b. Belanja

Secara keseluruhan belanja yang dilaksanakan Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menunjukkan nilai yang baik, karena dalam tahun anggaran 2015 telah mencapai 96,59 % sedangkan pada tahun anggaran 2014 juga mencapai 95,87 %.

Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh berbagai rekening kegiatan yang berada dibawah, yaitu :

- 1) Belanja perjalanan dinas
- 2) Belanja barang

Dengan demikian Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2015 tidak mengalami defisit 0,00 %

termasuk juga tahun anggaran 2014 karena tidak ada pendapatan. Hal ini menunjukkan penataan anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup baik.

Sedangkan laporan realisasi anggaran yang telah disajikan oleh Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang berbasis akuntansi akrual sebagai lampiran 2 pada skripsi ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1. Dari lampiran tersebut dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program belanja operasional belanja pegawai yaitu sebesar Rp.5.563.761.172,00,- atau 95,45% dari total anggaran sebesar Rp.5.828.848.297,-. Berikutnya dialokasikan untuk program belanja operasional belanja barang sebesar Rp. 5.318.906.601,- atau 95,24%, dari total anggaran sebesar Rp. 5.584.981.643,- selanjutnya yaitu belanja modal antara lain belanja peralatan dan mesin yaitu Rp.159.547.000,- .

## **2) Laporan Perubahan Anggaran lebih**

Dalam penyajian Laporan Perubahan Anggaran Lebih Berdasarkan jumlah anggaran tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menyediakan Rp. 5.828.848.297 bagi Belanja Pegawai dan telah terdistribusikan sebesar Rp. 5.563.761.172 kepada Belanja Pegawai sehingga terdapat anggaran lebih. Belanja Barang Rp. 5.584.981.643 dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.318.906.601. belanja peralatan dan mesin Rp. 159.900.000 dan telah terealisasi Rp. 159.547.000. belanja gedung dan bangunan Rp. 1.008.451.600 dan telah terealisasi Rp. 989.179.600. belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp.

15.558.005.270 dan telah terealisasi Rp. 15.242.493.850. dari penjabaran rencana dan realisasi tersebut ditemukan sisa lebih anggaran yang tidak terdistribusi sebesar Rp. 944.108.937. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tidak melakukan Laporan perubahan Anggaran Lebih tahun 2015, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### 3) *Laporan Operasional*

Berdasarkan laporan operasional jumlah pendapatan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dinilai baik, karena Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep ini mengadakan pungutan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 77.810.350 sebagai instansi penghasil, sehingga dalam laporan operasional terdapat target dan realisasi. Beban yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menunjukkan nilai yang baik, karena dalam tahun anggaran 2015 telah mencapai 96,59 % sedangkan pada tahun anggaran 2014 juga mencapai 95,87 %.

Dengan demikian Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2015 tidak mengalami defisit 0,00 % termasuk juga tahun anggaran 2014 karena tidak ada pendapatan. Hal ini menunjukkan penataan anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup baik.

#### 4) *Laporan perubahan Ekuitas*

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menyajikan ekuitas dana lancar yaitu dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp. (71.253.007). Ekuitas dana investasi yaitu diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 169.191.381.474. dan diinvestasikan dalam aset lainnya Rp. 3.242.173.500. dari penjabaran tersebut ditemukan perubahan ekuitas dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 172.364.301.966. Namun Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang untuk tahun 2015 tidak melakukan Laporan Perubahan Ekuitas dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### 5) *Neraca*

Berdasarkan neraca pada tahun anggaran 2015 dapat di evaluasi keadaan neraca yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

##### a. Aset Lancar

Aset yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep terlihat tidak ada peningkatan dari tahun ketahunnya, yaitu

Tahun 2015 penerimaan sebesar Rp.	0,00
Pengeluaran sebesar Rp.	0,00
Sisa di bendahara Rp.	0,00
Tahun 2014 penerimaan sebesar Rp.	0,00
Pengeluaran sebesar RP.	0,00

Sisa di bendahara RP. 0,00

Di Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tidak terdapat aset lancar.

b. Investasi Jangka Panjang

Dalam pertumbuhan investasi jangka panjang pada Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dinilai nol karena tidak ada investasi jangka panjang baik non permanen maupun permanen untuk dilakukan, sehingga investasi jangka panjang tidak mendapat nominal.

c. Pertumbuhan Aset Tetap

Pada pertumbuhan aset tetap yang ada pada neraca di Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dinilai baik, karena terjadi peningkatan 20,24 % dari tahun 2014 ke Tahun 2015, dan peningkatan ini di pengaruhi oleh , yaitu :

- 1) Berbagi peningkatan pada peralatan dan mesin yang kesemuanya telah di penuhi
- 2) Berbagi peningkatan pada gedung dan bangunan
- 3) Berbagi peningkatan pada jalan, irigasi dan jaringan

**4) Laporan Arus kas**

Berdasarkan laporan arus kas pada tahu 2015 dapat di evaluasi keadaan laporan arus kas yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang bahwa dalam arus masuk kas dinilai nol karena tidak ada arus masuk kas yang dilakukan. Akan tetapi pada arus keluar kas terdapat beberapa nominal yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jumlah arus keluar kas Rp. 22.791.781.510

b. Investasi dari Aset Nonkeuangan

Investasi dari Aset Nonkeuangan yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep bahwa dalam arus masuk kas dinilai nol karena tidak ada arus masuk kas yang dilakukan, akan tetapi pada arus keluar kas terdapat beberapa nominal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin Rp. 159.547.000., Belanja gedung dan bangunan Rp. 989.179.600., dan belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp. 15.242.493.850., dan jumlah arus keluar kas Rp. 16.391.220.450.,

c. Aktivitas pembiayaan

Aktivitas pembiayaan yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang bahwa dalam arus masuk kas dan arus keluar kas dinilai nol karena tidak ada arus masuk kas dan arus keluar kas yang dilakukan.

d. Aktivitas Nonanggaran

Aktivitas Nonanggaran yang ada pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang bahwa dalam arus masuk kas dan arus keluar kas dinilai nol karena tidak ada arus masuk kas dan arus keluar kas yang dilakukan.

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan Atas Laporan keuangan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah menunjukkan adanya kesesuaian untuk tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### 4.5.2. VALUE FOR MOE

Penelitian ini menggunakan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada periode tahun 2010 sampai tahun 2013 untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Rincian data APBD dan RAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang sudah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2015**

NO	URAIAN	TAHUN 2015	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>27.183.810.350</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0	0
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	27.183.810.350
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>28.140.186.810</b>	<b>27.273.888.223</b>
2.1	Belanja Pegawai	5.828.848.297	5.563.761.172
2.2	Belanja Barang	5.584.981.643	5.318.906.601
2.3	Belanja Peralatan dan Mesin	159.900.000	159.547.000
2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	1.008.451.600	989.179.600
2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	15.558.005.270	15.242.493.850
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(28.140.186.810)</b>	<b>(27.273.888.223)</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang 2015, diolah

**Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2014**

NO	URAIAN	TAHUN 2014	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>467.633.248</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0	0
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	467.633.248
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>572.741.939</b>	<b>553.199.539</b>
2.1	Belanja Pegawai	514.107.239	496.192.144
2.2	Belanja Barang	56.834.700	55.207.395
2.3	Belanja Peralatan dan Mesin	1.800.000	1.697.451
2.4	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0
2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	0	0
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(572.741.939)</b>	<b>(553.199.539)</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang 2014, diolah

#### 1. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melaksanakan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Ketentuan:

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka rasio ekonomis Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi 2014} = \frac{\text{Rp. 553.199.539}}{\text{Rp. 572.741.939}} \times 100 \% = 96,58 \%$$

$$\text{Rasio Ekonomi 2015} = \frac{\text{Rp. 27.273.888.223}}{\text{Rp. 28.140.186.810}} \times 100 \% = 96,92 \%$$

Dari hasil perhitungan rasio ekonomis diatas Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2014-2015 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis. Presentase pada tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat kenaikan 0,34 % dari 96,58 % menjadi 96,92 %. Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menggunakan sistem disiplin anggaran pada saat akan memulai pelaksanaan program pemerintahan maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran salah satu cara untuk menghindari booming pencairan anggaran dan dapat menekan pengeluaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara ekonomis.

## 2. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

**Keterangan:**

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

$$\text{Rasio Efisiensi 2014} = \frac{\text{Rp. 553.199.539}}{\text{Rp. 549.693.248}} \times 100 \% = 99,44 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2015} = \frac{\text{Rp. 27.273.888.223}}{\text{Rp. 27.183.810.350}} \times 100 \% = 96,55 \%$$

Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode tahun 2014 hingga tahun 2015 semakin mengalami peningkatan. Tahun 2014 rasio efisiensi kabupaten Sumenep menunjukkan 99,44 %, tahun 2015 menunjukkan 96,55 %,.. Kinerja pemerintah menurut perhitungan rasio efisiensi berada pada katagori efisien. Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur dan SDM untuk mengelolah sumber daya alam yang terdapat diwilayah Kota Sumenep dan kepulauan seperti yang telah tercantum pada misi Kabupaten Sumenep.

### 3. Rasio Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rasio efektivitas dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektifitas berimbang

$$\text{Rasio Efektifitas 2014} = \frac{\text{Rp. 28.140.186.810}}{\text{Rp. 553.199.539}} \times 100 \% = 95,22 \%$$

$$\text{Rasio Efektifitas 2015} = \frac{\text{Rp. 27.273.888.223}}{\text{Rp. 572.741.939}} \times 100 \% = 97,15 \%$$

Dari tabel di atas perkembangan kinerja pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektifitas mengalami peningkatan. pada tahun 2014 hingga tahun 2015 kinerja pemerintah meningkat dan berada pada katagori efektif yaitu sebesar 95,22 %, 97,15 % . Artinya pemerintah daerah Kabupaten Sumenep berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah menunjukkan 96,64 % yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 . Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep sisa lebih pembiayaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian Laporan Operasional yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dinilai baik karena telah mencapai peningkatan dari tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PU. Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tidak melakukan laporan perubahan ekuitas. Penyajian Neraca yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam bentuk Neraca telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian Laporan Arus Kas yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang disajikan dalam bentuk Laporan Arus kas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah

menunjukkan adanya kesesuaian dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Pada kesimpulan diatas tersebut terdapat beberapa laporan akuntansi keuangan yang telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi :Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan arus kas, dan CALK. Namun ada sebagian laporan yang tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yaitu :penyajian laporan perubahan saldo anggaran lebih dan penyajian laporan perubahan ekuitas.

Berdasarkan metode value for money kinerja pemerintah daerah Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2014-2015, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 96,58 %, 96,92 %, Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2014-2015 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, dan berada pada kategori efisien. Rasio efektifitas pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 95,22 %, 97,15 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip value for money adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.

## 5.2. Saran

Adapun saran-saran alternatif yang dapat di berikan demi penyempurnaan selanjutnya dalam pelaksanaan ini adalah :

1. Untuk lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akuntansi agar dapat memenuhi kepentingan pengguna anggaran dan publik.
2. Pada pertanggungjawaban keuangan senantiasa dilakukan evaluasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Senantiasa untuk melakukan akuntansi investasi agar pengelolaan keuangan lebih sesuai denga kebutuhan dan keadaan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, Abdul. (2003). *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*. Jurnal KIMFEB. Vol. 1. (1): Hal: 9-16.
- Al-Qur'an. (Dalam Surat An-Nisa' Ayat 58 dan Ayat 59)
- Bunging, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada
- Kema, ihawan. (2013). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, bisnis dan akuntansi. Vol. 1 (3): hal: 771-781.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Mahsun, Mohammad. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPFE. Yogyakarta
- Manangkalangi, Kurniawan. (2013). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol. 1. (3): hal 22-31
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Gede, Muhammad. (2000) *Akuntansi Pemerintah*. Lebaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Siregar, Benni. (2005). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*, STIE, Yogyakarta,
- Sugiyono. (2003). *Prosedur Penelitian*. Liberty, Yogyakarta,
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan*, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah*.

Lampiran 1

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**SKPD DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2015**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	SISA/LEBIH
1	PENDAPATAN				
2					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	27,183,810,350.00	0.00	27,183,810,350.00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4-7)	0.00	27,183,810,350.00	0.00	27,183,810,350.00
9					
10	PENDAPATAN TRANSFER				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dana Bagi Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12-15)	0.00	0.00	0.00	0.00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA				
19	Dana perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19)	0.00	0.00	0.00	0.00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (23)	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Total pendapatan Transfer (16+20+24)	0.00	0.00	0.00	0.00
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (28)	0.00	0.00	0.00	0.00
30	JUMLAH PENDAPATAN (8+25+29)	0.00	27,183,810,350.00	0.00	27,183,810,350.00
31					
32	BELANJA				
33					
34	BELANJA OPERASI				
35	Belanja pegawai	5,828,848,297.00	5,563,761,172.00	95.45	(265,087,125.00)
36	Belanja Barang	5,584,981,643.00	5,318,906,601.00	95.24	(266,075,042.00)
37	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 41)	11,413,829,940.00	10,882,667,773.00	95.35	(531,162,167.00)
43					
44	BELANJA MODAL				
45	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Belanja Peralatan dan Mesin	159,900,000.00	159,547,000.00	99.78	(353,000.00)
47	Belanja Gedung dan bangunan	1,008,451,600.00	989,179,600.00	98.09	(19,272,000.00)
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,558,005,270.00	15,242,493,850.00	97.97	(315,511,420.00)
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Jumlah Belanja Modal (45 s/d 49)	16,726,356,870.00	16,391,220,450.00	98.00	(335,136,420.00)
51					
52	BELANJA TAK TERDUGA				
53	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Jumlah belanja Tak Terduga(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
55	JUMLAH BELANJA (42+50+54)	28,140,186,810.00	27,273,888,223.00	96.92	(866,298,587.00)
56					
57	TRANSFER				
58	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				
59	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Desa (59)	0.00	0.00	0.00	0.00
61	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55 + 60)	28,140,186,810.00	27,273,888,223.00	96.92	(866,298,587.00)
62					
63	SURPLUS/DEFISIT (30-61)	(28,140,186,810.00)	(27,196,077,873.00)	96.64	944,108,937.00
64					
65	PEMBAYAAN				
66					
67	PENERIMAAN DAERAH				
68	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Perencanaan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00

71	Transfer dari Dana Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Penerimaan Pinang	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Penerimaan Dari Dana Penguatan/Pernyataan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<b>Jumlah Penerimaan (68 s/d 73)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
75					
76	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
77	Transfer ke Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Pernyataan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Transfer ke Dana Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00
82	<b>Jumlah pengeluaran (76 s/d 80)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
83					
84	<b>PEMBIAYAAN NETTO (74 - 82)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85					
86	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(28,140,186,810.00)</b>	<b>(27,196,077,873.00)</b>	<b>96.64</b>	<b>944,108,937.00</b>



lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
SKPD DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2014**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	SISA/LEBIH
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2					
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	467,633,248.00	0.00	467,633,248.00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4-7)</b>	<b>0.00</b>	<b>467,633,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,633,248.00</b>
9					
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
11	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dana Bagi Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
16	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12-15)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17					
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
19	Dana penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
24	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi (23)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	<b>Total pendapatan Transfer (16+20+24)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26					
27	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
28	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
29	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (28)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN (8+25+29)</b>	<b>0.00</b>	<b>467,633,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,633,248.00</b>
31					
32	<b>BELANJA</b>				
33					
34	<b>BELANJA OPERASI</b>				
35	Belanja pegawai	514,107,239.00	496,192,144.00	95.45	(265,087,125.00)
36	Belanja Barang	56,834,700.00	55,207,395.00	95.24	(266,075,042.00)
37	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
42	<b>Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 41)</b>	<b>11,413,829,940.00</b>	<b>10,882,667,773.00</b>	<b>95.35</b>	<b>(531,162,167.00)</b>
43					
44	<b>BELANJA MODAL</b>				
45	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Belanja Peralatan dan Mesin	1,800,000.00	1,697,451.00	99.78	(353,000.00)
47	Belanja Gedung dan bangunan	0.00	0.00	98.09	(19,272,000.00)
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	97.97	(315,511,420.00)
49	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
50	<b>Jumlah Belanja Modal (45 s/d 49)</b>	<b>16,726,356,870.00</b>	<b>16,394,220,450.00</b>	<b>98.00</b>	<b>(335,136,420.00)</b>
51					
52	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
53	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
54	<b>Jumlah belanja Tak Terduga(53)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55	<b>JUMLAH BELANJA (42+50+54)</b>	<b>28,140,186,810.00</b>	<b>5,353,977,827.00</b>	<b>96.92</b>	<b>(866,298,587.00)</b>
56					
57	<b>TRANSFER</b>				
58	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA</b>				
59	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
60	<b>Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Desa (59)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55 + 60)</b>	<b>28,140,186,810.00</b>	<b>5,353,977,827.00</b>	<b>96.92</b>	<b>(866,298,587.00)</b>
62					
63	<b>SURPLUS/DEFISIT (30-61)</b>	<b>(572,741,939.00)</b>	<b>(553,199,539.00)</b>	<b>96.64</b>	<b>38,542,335.00</b>
64					

65	<b>PEMBIAYAAN</b>				
66					
67	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
68	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Perencanaan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
70	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
71	Transfer dari Dana Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Penerimaan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Penerimaan Dari Dana Penguatan/Penyertaan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Jumlah Penerimaan (68 s/d 73)	0.00	0.00	0.00	0.00
75					
76	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
77	Transfer ke Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Penyertaan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penyertaan Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Transfer ke Dana Deposito	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Jumlah pengeluaran (76 s/d 80)	0.00	0.00	0.00	0.00
83					
84	<b>PEMBIAYAAN NETTO (74 - 82)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85					
86	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(572,741,939.00)</b>	<b>(553,199,539.00)</b>	<b>96.64</b>	<b>38,542,335.00</b>

lampiran 3

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NERACA**  
**SKPD DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

URAIAN	2015	2014
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>		
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara penerimaan	0,00	0,00
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang</b>		
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
<b>Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Aset lancar (3 s/d 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Nonpermanen</b>		
Pinjaman Kepada Perusahaan negara	0,00	0,00
Pinjaman kepada perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Masyarakat (Dana Bergulir)	0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (20 s/d 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	90,000,000.00	90,000,000.00
Peralatan dan mesin	2,339,148,550.00	2,162,151,550.00
Gedung dan Bangunan	23,462,405,395.00	22,467,757,395.86
Jalan, irigasi dan Jaringan	143,127,693,649.05	127,804,917,649.05
Aset Tetap Lainnya	0,00	2,742,213,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	172,133,880.00	172,133,880.00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>169,191,381,474.91</b>	<b>155,439,173,974.91</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana cadangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan (43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Pembendaharaan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	3,244,173,500.00	452,960,000.00
Aset Lain-lain	0,00	48,420,000.00
<b>Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)</b>	<b>3,244,173,500.00</b>	<b>501,380,000.00</b>
<b>JUMLAH ASET (17+32+41+44+52)</b>	<b>172,435,554,974.91</b>	<b>155,940,553,974.91</b>

<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00
Utang Retensi	71,253,007.94	65,122,257.94
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah daerah lainnya	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bank	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan bank	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
Bagian Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek lainnya	0.00	0.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 64)</b>	<b>71,253,007.94</b>	<b>65,122,257.94</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (65 s/d 72)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN (65 S/D 73 )</b>	<b>71,253,007.94</b>	<b>65,122,257.94</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembayaan Anggaran	0.00	0.00
Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	0.00
Cadangan Piutang	0.00	0.00
Cadangan Persediaan	0.00	0.00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka pendek	(71,253,007.94)	(65,122,457.94)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (77 s/d 81)</b>	<b>(71,253,007.94)</b>	<b>(65,122,457.94)</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	169,191,381,474.91	155,439,173,974.91
Diinvestasikan Dalam Aset lainnya	3,244,173,500.00	501,380,000.00
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka panjang	0.00	0.00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)</b>	<b>172,435,554,974.91</b>	<b>155,940,553,974.91</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 +92)</b>	<b>172,364,301,966.97</b>	<b>155,875,431,516.97</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+93)</b>	<b>172,435,554,974.91</b>	<b>155,940,553,974.91</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**SKPD DINAS PU, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2015**

NO.	URAIAN	2015	2014
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	77,810,350,00	77,810,350,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00
9	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
10	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	0,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
16	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>	<b>77,810,350,00</b>	<b>77,810,350,00</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>		
20	Belanja Pegawai	5,563,761,172,00	(265,087,125,00)
21	Belanja Barang	5,318,906,601,00	(266,075,042,00)
22	Bunga	0,00	0,00
23	Subsidi	0,00	0,00
24	Hibah	0,00	0,00
25	Bantuan Sosial	0,00	0,00
26	Belanja Tak terduga	0,00	0,00
27	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
28	Bagi hasil Retrebusi	0,00	0,00
29	Bagi Hasil Pendapatan lainnya	0,00	0,00
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>	<b>10,882,667,773,00</b>	<b>(531,162,167,00)</b>
31	<b>ARUS KAS BERSIH dari AKTIVITAS OPERASI (18-30)</b>		
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
33	<b>Arus Masuk Kas</b>		
34	Pendapatan Penjualan Atas Dana	0,00	0,00
35	Pendapatan Atas Peralatan Tanah dan mesin	0,00	0,00
36	Pendapatan Atas Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00
37	Pendapatan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
38	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
39	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
40	<b>Jumlah Arus masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>		
42	Belanja Tanah	0,00	0,00
43	Belanja Peralatan dan mesin	159,547,000,00	(353,000,00)
44	Belanja gedung dan Bangunan	989,179,600,00	(19,272,000,00)
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,242,493,850,00	(315,511,420,00)
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
47	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>16,391,220,450,00</b>	<b>(335,136,420,00)</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Aset Nonkeuangan (40-48)</b>	<b>16,391,220,450,00</b>	<b>(335,136,420,00)</b>
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
57	<b>Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00

60	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
63	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
64	<b>Arus Keluar Kas</b>		
65	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga keuangan Bank	0.00	0.00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
73	Pemberian Pinjaman Pada Perusahaan Negara	0.00	0.00
74	Pemberian Pinjaman Pada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
75	Pemberian Pinjaman Pada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
76	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 76)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
77	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan (64 s/d 76)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
79	<b>Arus Masuk Kas</b>		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
81	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
82	<b>Arus Keluar Kas</b>		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 s/d 84)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
86	<b>Kenaiakan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)</b>	<b>53,568,992,384.00</b>	<b>(26,198,411,896.00)</b>
87	Saldo Awal Kas di BUD		
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	61,779,619,514.00	8,210,627,130.00
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
91	<b>Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)</b>	<b>61,779,619,514.00</b>	<b>8,210,627,130.00</b>

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Fajrur Rahman Syawali

NIM : 12520090

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dengan Dosen Pembimbing	Hasil Ujian Skripsi
Analisis Pengelolaan Akuntansi Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money pada Dinas PU Cipta Karya Dan Taata Ruang Kabupaten Sumenep	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money pada Dinas PU Cipta Karya Dan Taata Ruang Kabupaten Sumenep

Malang, 04 Januari 2017

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing/Dosen Penguji

  
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

## BUKTI KONSULTASI

Nama: : Fajrur Rahman Syawali  
NIM/Jurusan : 12520090/Akuntansi  
Dosen Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak., CA  
Judul Skripsi : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip  
*Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata  
Ruang Kabupaten Sumenep

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	03 Februari 2016	Pengajuan Outline	1.
2	13 Maret 2016	Proposal	2.
3	16 Maret 2016	Revisi Proposal	3.
4	11 April 2016	Revisi Proposal	4.
5	26 Mei 2016	Revisi & Persetujuan Proposal	5.
6	09 Juni 2016	Seminar Proposal	6.
7	22 Juni 2016	Acc Proposal	7.
8	26 Juli 2016	Skripsi Bab I-IV	8.
9	19 Agustus 2016	Revisi Bab IV	9.
10	29 Agustus 2016	Revisi Bab IV	10.
11	01 September 2016	Ujian Komprehensif	11.
12	05 September 2016	Skripsi Bab IV	12.
13	08 September 2016	Revisi Bab IV	13.
14	09 September 2016	Revisi Bab IV	14.
15	09 November 2016	Revisi Bab IV	15.
16	30 November 2016	Revisi Bab IV	16.
17	21 Desember 2016	Revisi Bab IV	17.
18	25 Desember 2016	Revisi Bab IV	18.
19	27 Desember 2016	Acc Keseluruhan	19.

Malang, 26 Desember 2016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Fajrur Rahman syawali  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 16 Maret 1994  
Alamat Asal : Jl. Trunojoyo Gg. IX Kec. Batuan Kab. Sumenep  
Alamat Kos : Jl. Pondok Harapan Indah Blok B 150 Malang  
Telepon : 081939072252  
E-mail : fajrurrahmansyawali16@yahoo.com  
Facebook : Fajrur Rahman Syawali

### **Pendidikan Formal**

2001-2006 : MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Kolor  
2006-2009 : MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Terate  
2009-2012 : MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Sumenep  
2012-2017 : UIN (Universitas Islam Negeri) Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2010-2011 : Pengurus OSIS MAN Sumenep